

GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG

Brainhart Dwitomo Pirastra

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 memakai kata “Layak dan adil” tetapi tidak pernah menjelaskan definisi “Layak dan adil”. Ini membuat pasal yang memakai “Layak dan adil” tidak jelas. Ini adalah masalah hukum karena ketentuan hukum yang tidak jelas tidak bisa mengatur secara efektif dan tidak bisa diikuti dan ditegakkan dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini akan meneliti 2 masalah, yaitu menemukan definisi “Layak dan adil” menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan meneliti bagaimana ganti kerugian pengadaan tanah dapat menjadi layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memakai berbagai macam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk meneliti solusi untuk 2 masalah penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa agar ganti kerugian dapat menjadi layak dan adil dan memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengharuskan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan layak dan adil, ganti kerugian yang diberikan harus memiliki jumlah nilai yang cukup untuk memberi kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik untuk pihak yang dirugikan dan nilai beserta bentuk ganti kerugian tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ditentukan secara adil (tidak diskriminatif dan sepatutnya) dan baik.

Kata Kunci: Layak dan Adil, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah

REPLACEMENT OF LAND PROCUREMENT DAMAGES FOR PUBLIC INTEREST BASED ON LAW

Brainhart Dwitomo Pirastra

Abstract

Law Number 2 of 2012 uses the word "Proper and fair" but never explains the definition of "Proper and fair". This makes the article which uses "Proper and fair" unclear. This is a legal problem because unclear legal provisions cannot regulate effectively and cannot be followed and enforced properly. To overcome this problem, this research will examine 2 problems, namely to find the definition of "Proper and fair" according to Law Number 2 of 2012 and to research how compensation for land acquisition can become proper and fair. This research is a normative legal research. This study uses a variety of primary and secondary legal sources to examine solutions to these 2 research problems. This study found that in order for compensation to be feasible and fair and meet the provisions of article 9 paragraph 2 of Law Number 2 of 2012 which requires that compensation for land acquisition for public interest be made properly and fairly, the compensation provided must have a sufficient amount of value to provide welfare and a better life for the disadvantaged party and the value and the form of compensation must be made in accordance with the provisions of the applicable law and is determined fairly (non-discriminatory and appropriate) and kindly.

Keywords: Proper and Fair, Compensation, Land Acquisition